



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Februari 2017

Halaman: 10

Deteksi Pelanggaran Secepat Mungkin

JOGJA, BERNAS -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY memasifkan pengawasan menjelang hari pencoblosan Pilkada serentak di Kota Yogyakarta dan Kulonprogo, Rabu (15/2) besok. Para relawan dibekali dengan aplikasi khusus untuk mendeteksi pelanggaran secepat mungkin.

"Keberadaan relawan pengawas pemilu tersebar di mana-mana termasuk di TPS-TPS (Tempat Pemungutan Suara)," ujar Muhammad Najib, Ketua Bawaslu DIY usai rapat kerja dengan Komisi A DPRD DIY, Senin (13/2).

Najib mengatakan geliat masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada di Kulonprogo dan Kota Yogyakarta cukup tinggi. "Kita ada program partisipasi pemilu yang mendorong masyarakat terlibat dalam pengawasan," ujarnya.

Bawaslu DIY juga memiliki grup khusus memanfaatkan media Whats App. Melalui grup tersebut masyarakat dengan cepat memberikan berbagai laporan terkait pelanggaran Pilkada lengkap dengan data-data pendukung. "Kita ada grup WA yang beranggotakan para relawan, setidaknya ada 170 relawan dari mahasiswa," katanya.

Ia mengatakan sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu DIY memang terus memperketat pengawasan. Terlebih menjelang hari pencoblosan maka tingkat kerawanan pelanggaran Pilkada juga makin menguat.

"Relawan lebih banyak kita konsentrasikan di Pilkada Kota karena Kota ini memiliki kerawanan pelanggaran lebih besar dibanding Kulonprogo.

Kita juga sediakan aplikasi khusus, ada pelanggaran langsung direkam, diupload sehingga celah-celah pelanggaran akan tertutupi," katanya.

Bawaslu DIY mengungkapkan separo dari jumlah TPS khususnya di Kota Yogyakarta rawan terjadi kesalahan administrasi. "Ada sekitar 400-an TPS," katanya.

Menurut dia banyak TPS di Kota Yogyakarta yang rawan terjadi pelanggaran karena dimungkinkan petugas KPPS tidak memahami prosedur. "Juga bagi kaum difabel rawan tidak memilih karena tidak memiliki akses untuk mencoblos," katanya.

Selain itu, kerawanan pelanggaran Pilkada di Kota Yogyakarta lebih tinggi karena Kota merupakan ibukota DIY. "Kita melihat ada banyak kepentingan, potensi konfliknya cukup besar karena itu harus terus kita eliminasi," katanya.

Sedangkan untuk pemetaan kerawanan di Pilkada Kulonprogo, Bawaslu mengungkapkan adanya potensi money politics di sejumlah TPS.

"Ini tidak bisa kami sebutkan TPS mana saja. Tapi kami akan intai terus," tegas dia.

Sedangkan Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan APBD DIY mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Kota Yogyakarta senilai Rp 3 miliar dan Pilkada Kulonprogo senilai Rp 4 miliar. "Mekanisme anggaran memang tidak langsung ke lembaga penyelenggara pemilu namun melalui bantuan keuangan," jelasnya.

Menurutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Pilkada. "Yang utama menjamin hak konstitusi warga negara, termasuk orang yang sedang sakit di rumah sakit, orang-orang di lapas atau lainnya. Tidak boleh satu pun warga negara yang tercecer," katanya.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan 18 Rumah Sakit (RS) di Kota Yogyakarta sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

"Tapi hanya beberapa RS yang potensi dibuat TPS. Termasuk petugas RS dimasukkan ke TPS setempat. Kita fasilitasi dengan A5," tandas dia. (age)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005